

## **Analysis of Internal Control Over Drug Supplies at The Sikka District Health Office**

### **Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka**

**Maria Nona Dince<sup>1\*</sup>, Maria Goreti Mao Tokan<sup>2</sup>**

Universitas Nusa Nipa<sup>1,2</sup>

[mdince33@gmail.com](mailto:mdince33@gmail.com)\*

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze internal control over drug inventory at the Sikka Regency Health Office. The method used in this research is descriptive qualitative method, the sample in this research is the Pharmacist section at the Sikka Regency Health Office. The data collection methods in this study were interviews and documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman theory and adjusted to the existing data. In the context of the Sikka District Health Office, the use of SOPs for inventory control of medicines demonstrates a commitment to the creation of a healthy control environment. The Sikka District Health Office has emphasized the importance of making Standard Operating Procedures (SOPs) for all stages of inventory control of medicines from planning to recording reporting. This demonstrates a commitment to ensuring the medicines inventory management process is carried out in a structured and efficient manner, with detailed SOPs for each step. In the area of Monitoring, Monitoring of medicines in relation to the internal control system at the Sikka District Health Office is carried out through monthly stock-taking by checking the conformity between stock cards, physical goods, and reporting. This process reflects an effort to regularly monitor and evaluate the state of medicine supplies. The Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka can identify any discrepancies or mismatches that may indicate problems in inventory management. This enables them to immediately take the necessary corrective actions, such as further investigation or inventory adjustments, to ensure that medicine supplies remain well managed and accurate.*

**Keywords:** Internal Control Analysis, Drug Inventory at the Sikka Regency Health Office

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal terhadap persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sampel dalam penelitian ini adalah bagian Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teori Miles dan Huberman dan disesuaikan dengan data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, atas persediaan obat dalam bidang lingkungan pengendalian. Dalam konteks Dinas Kesehatan kabupaten Sikka, penggunaan SOP untuk pengendalian persediaan obat-obatan menunjukkan komitmen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang sehat. Dinas Kesehatan kabupaten Sikka telah menegaskan pentingnya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua tahap pengendalian persediaan obat-obatan dari perencanaan hingga pencatatan pelaporan. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proses manajemen persediaan obat-obatan dilakukan secara terstruktur dan efisien, dengan SOP yang terinci untuk setiap langkah. Dalam bidang Pengawasan, Pemantauan obat-obatan dalam kaitan dengan system pengendalian internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dilakukan melalui stok opname bulanan dengan memeriksa kesesuaian antara kartu stok, fisik barang, dan pelaporan. Proses ini mencerminkan upaya untuk secara teratur mengawasi dan mengevaluasi keadaan persediaan obat-obatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakcocokan yang mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Langkah ini memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan, seperti penyelidikan lebih lanjut atau penyesuaian inventaris, untuk memastikan bahwa persediaan obat-obatan tetap terkelola dengan baik dan akurat

**Kata Kunci:** Analisis Pengendalian Internal, Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

### **1. Pendahuluan**

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga

untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*unified budget*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*performance budget*). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*).

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran. Namun hingga saat ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai harapan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para perencana setiap tahun diantaranya adalah sulitnya sinkronisasi dan koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau tergesa-gesa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka para perencana diharapkan dapat memahami siklus dan jadwal serta kegiatan umum perencanaan dan penganggaran. Hal ini untuk memudahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN). Perhatian ditekankan pada sinkronisasi antara Pusat dan Daerah khususnya untuk Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP). Dengan mengetahui dan memahami siklus dan jadwal penyusunan serta kegiatan umum perencanaan APBN ini, diharapkan dapat Menyusun perencanaan dengan baik dan tepat waktu.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi sektor publik dituntut untuk menghadapi tekanan agar lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Aktifitas utama dari Dinas Kesehatan adalah memberikan pelayanan dan perawatan, salah satunya di persediaan obat. Perhatian terhadap persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan sangat penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan suatu Dinas Kesehatan sehingga dengan tersedianya persediaan obat-obatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa Dinas Kesehatan (pasien). Pengelolaan obat pada Dinas Kesehatan bertujuan untuk menjamin kelangsungan, ketersediaan, dan keterjangkauan obat yang efisien, efektif dan rasional. Dimana pengendalian obat merupakan kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.

Organisasi sektor publik merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan pelayanan yang bersifat monopolistik, yang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat.

Menurut PP No 51 tahun 2009, apotek menjalankan fungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian berupa penjualan atas obat-obatan yang sangat rentan untuk mengalami kerusakan, pencurian dan kadaluarsa. Penerapan pengendalian internal atas persediaan obat dalam Puskesmas Bahu sudah ada tapi belum diketahui apakah sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan dalam persediaan obat tersebut.

Pengendalian Internal merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan bahkan instansi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengendalian internal diperlukan untuk melakukan tindakan pengamanan dimana bertujuan agar bisa mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Selain itu, pengendalian internal ditujukan agar semua aturan yang ditetapkan dilaksanakan oleh semua staff organisasi (Daos dan Angi, 2019).

*Committeef Sponsoring Organization* atau disingkat (COSO), adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan buat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Pengendalian internal menurut *Committeef Sponsoring Organization* (COSO) dibagi kedalam lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktifitas pengendalian, informasi, dan komunikasi serta pengawasan (Suryani, 2019). Oleh karena itu setiap organisasi, perusahaan maupun instansi perlu menjalankan pengendalian internal agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan pengendalian internal menurut PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan oerorganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut (Makikui et al., 2017), salah satu jenis pengendalian yang harus dilakukan pada sebuah organisasi adalah pengendalian terhadap persediaan, karena persediaan merupakan salah satu sumber pemasukan. Dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 14 (2014), Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 5 peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, instansi dinas kesehatan yang memiliki persediaan obat diperlukan pengendalian internal untuk melindungi persediaan obat tersebut dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai persediaan obat.

Pengendalian internal persediaan juga sangat memiliki arti penting, dimana pengendalian internal bisa menjaga ketersediaan persediaan dan juga dapat menargetkan kapan persediaan tersebut habis dan kapan persediaan perlu diperbaharui. Pengelolaan persediaan obat pada Dinas Kesehatan sangatlah penting karena peresediaan tersebut akan di *supplies* ke pelayanan kesehatan yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Polindes, dan juga Apotik yang dibangun oleh pemerintah yang dimana menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan

dituntut untuk selalu efisien dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap masyarakat.

Penelitian tentang analisis pengendalian internal terhadap persediaan obat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Djuhari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat-Obatan Pada UPTD Puskesmas Puncu" menyatakan bahwa hasil penelitian ini menampilkan bahwa sistem pengendalian internal pada UPTD Puskesmas Puncu telah berjalan baik dengan didukung oleh tata nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Puskesmas Puncu menggunakan tata nilai PERMATA (profesional, empati, ramah, memuaskan, aktif tanggap dan aman) sebagai landasan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal.

Priyastiyi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat (Studi Kasus Di Apotek Mukti)" menunjukkan bahwa apotik mukti telah menerapkan sebagian besar pengendalian internal atas persediaan obat yang sesuai dengan standar pengendalian internal menurut COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*). Komponen yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eriswanto (2020) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi) menunjukkan bahwa Puskesmas Bojonggenteng sudah menerapkan sebagian besar pengendalian internal namun, belum memiliki dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal persediaan selain itu puskesmas telah membentuk struktur organisasi namun masih terdapat rangkap fungsi yang dilakukan karyawan pengelolaan persediaan yang ada di puskesmas tidak lepas dari berbagai resiko yang mungkin terjadi.

Dari uraian ketiga penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengukur penerapan pengendalian internal. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya dimana menurut Djuhari (2011) menggunakan tata nilai PERMATA (profesional, empati, ramah, memuaskan, aktif, tanggap dan aman, menurut Priyastiyi (2021) komponen yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu lingkungan pengendalian, dan menurut Eriswanto (2020) belum memiliki dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal persediaan.

Dari beberapa penelitian diatas penulis ingin menguji kembali dengan penelitian dari penulis dengan judul Pengendalian Internal atas Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah periode waktu terbaru yaitu 2023 dan tempat penelitiannya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang beralamat Jalan Eltari Maumere merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai kesehatan dan memiliki tugas untuk perumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi bidang kesehatan dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.

## 2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga

memudahkan penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui sistem pengendalian internal persediaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

### **3. Hasil dan Pembahasan** **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merujuk pada konteks di mana suatu organisasi beroperasi, termasuk budaya, struktur, filosofi manajemen, dan nilai-nilai yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, pemisahan tugas yang jelas, nilai-nilai seperti akuntabilitas, dan kejujuran yang menjadi dasar moral bagi sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian yang sehat menciptakan landasan kokoh bagi pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Kesehatan kabupaten Sikka telah menegaskan pentingnya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua tahap pengendalian persediaan obat-obatan dari perencanaan hingga pencatatan pelaporan. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proses manajemen persediaan obat-obatan dilakukan secara terstruktur dan efisien, dengan SOP yang terinci untuk setiap langkah. Tindakan ini menunjukkan perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terhadap kontrol kualitas dan keamanan dalam manajemen persediaan obat-obatan serta memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengendalian persediaan obat-obatan. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini: "Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan lewat pembuat SOP untuk semua tahap pengendalian persediaan obat-obatan dari perencanaan sampai pencatatan pelaporan".

### **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi berbagai ancaman dan peluang, menilai dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut, serta menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Penilaian risiko membantu organisasi untuk memahami potensi dampak negatif dan positif dari risiko-risiko yang dihadapi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

Penilaian risiko yang terungkap pada dinas kesehatan adalah bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko kritis dengan memperhatikan faktor-faktor penting seperti sarana penunjang dalam penyimpanan obat-obatan, termasuk suhu dan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kondisi penyimpanan obat-obatan. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang krusial seperti suhu, mereka berupaya untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan efektivitas obat akibat kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Dengan demikian, penilaian risiko ini mencerminkan pendekatan proaktif dalam memastikan keamanan dan kualitas obat-obatan yang disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini:

"Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengidentifikasih resiko-resiko kritis dengan selalu memperhatikan sarana penunjang yang diperlukan dalam penyimpanan obat-obatan seperti suhu dan lain-lain".

### **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Ini meliputi berbagai langkah, prosedur, kebijakan, dan praktik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatifnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa risiko-risiko dapat dikelola dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih aman dan efisien.

Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah memastikan adanya pemisahan tugas yang jelas. Hal ini dicapai melalui pembagian Penanggung Jawab (PJ) ruangan dan pembagian tugas pelaporan yang diatur dalam Surat Keputusan Pelaksanaan (SKP) masing-masing petugas Gudang. Pembagian PJ ruangan membantu dalam memastikan bahwa tanggung jawab terkait dengan penyimpanan obat-obatan dipisahkan secara efektif antara berbagai ruangan atau bagian dalam Gudang. Sementara itu, pembagian tugas pelaporan yang tercantum dalam SKP masing-masing petugas Gudang memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya secara spesifik dan transparan. Dengan demikian, aktivitas pengendalian ini membantu dalam mengurangi risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini: "Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan adanya pemisahan tugas dengan adanya pembagian PJ ruangan, pembagian tugas pelaporan yang tercantum dalam SKP masing-masing petugas Gudang".

Aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah pengaturan seluruh proses dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tahapan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah menetapkan prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap langkah dalam pengendalian persediaan obat-obatan, memastikan konsistensi, transparansi, dan efisiensi dalam manajemen persediaan tersebut. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini:

"Pengendalian semua diatur dalam SOP setiap tahapan".

Aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah adanya sistem pelaporan internal yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada atasan. Bahkan, dalam situasi tertentu seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), pelaporan dilakukan setiap hari terkait dengan stok obat-obatan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan mekanisme pemantauan yang teratur dan responsif terhadap kondisi persediaan obat-obatan mereka. Dengan adanya pelaporan yang teratur, manajemen dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kebutuhan yang mendesak, sehingga dapat mengambil tindakan yang sesuai secara cepat dan efisien. Hal ini membantu memastikan bahwa persediaan obat-obatan tetap terkendali, terkelola dengan baik, dan dapat diakses dengan tepat pada setiap situasi, termasuk dalam keadaan darurat seperti KLB. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini: "Ada system pelaporan internal yang dilaporkan setiap bulan kepada atasan bahkan apabila pada situasi tertentu seperti KLB biasanya dilaporkan setiap hari tentang stok".

### **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal melibatkan aliran informasi yang efektif dan transparan di organisasi, serta proses komunikasi yang

mendukung pencapaian tujuan dan pengelolaan risiko. Ini mencakup pertukaran informasi yang tepat antara manajemen dan karyawan, serta pemakaian sistem informasi yang handal untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Dengan komunikasi dan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mencegah kecurangan, dan mengatasi masalah dengan cepat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan informasi terkait persediaan obat-obatan disampaikan secara jelas dan cepat melalui laporan mutasi yang dikirim setiap bulan kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk menjaga aliran informasi yang lancar dan transparan terkait dengan persediaan obat-obatan mereka. Dengan mengirimkan laporan mutasi secara rutin, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat memberikan update yang terperinci tentang perubahan dalam persediaan obat-obatan kepada pihak yang membutuhkan, termasuk manajemen, staf gudang, dan pihak terkait lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan tersebut, mengidentifikasi masalah potensial, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan obat-obatan. Dengan demikian, upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam memastikan informasi yang jelas dan cepat terkait dengan persediaan obat-obatan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal mereka. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini: "Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan bahwa informasi terkait persediaan obat-obatan disampaikan secara jelas dan cepat yaitu dengan laporan mutasi yang selalu dikirimkan setiap bulan kepada pihak-pihak terkait".

### **Pemantauan**

Pemantauan dalam sistem pengendalian internal adalah proses untuk secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas operasional dari kontrol internal yang telah ditetapkan. Ini melibatkan peninjauan terhadap kegiatan sehari-hari untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur pengendalian tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Pemantauan juga melibatkan identifikasi dan penanganan masalah atau pelanggaran yang terdeteksi selama proses pemantauan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal terus berfungsi secara efektif dan dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi.

Pemantauan obat-obatan dalam kaitan dengan system pengendalian internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dilakukan melalui stok opname bulanan dengan memeriksa kesesuaian antara kartu stok, fisik barang, dan pelaporan. Proses ini mencerminkan upaya untuk secara teratur mengawasi dan mengevaluasi keadaan persediaan obat-obatan. Dengan membandingkan data yang tercatat dalam kartu stok dengan jumlah fisik barang yang ada dan pelaporan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakcocokan yang mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Langkah ini memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan, seperti penyelidikan lebih lanjut atau penyesuaian inventaris, untuk memastikan bahwa persediaan obat-obatan tetap terkelola dengan baik dan akurat. Dengan demikian, pemantauan melalui stok opname bulanan merupakan bagian penting dari sistem

pengendalian internal Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memastikan kepatuhan dan keandalan pengelolaan persediaan obat-obatan. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara berikut ini: "Pemantauan dilakukan melalui stok opname bulanan dengan melihat kecocokan antara kartu stok, fisik barang dan pelaporan".

## **Penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka ditinjau dari standar pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008**

### **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merujuk pada konteks di mana suatu organisasi beroperasi, termasuk budaya, struktur, filosofi manajemen, dan nilai-nilai yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, pemisahan tugas yang jelas, nilai-nilai seperti akuntabilitas, dan kejujuran yang menjadi dasar moral bagi sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian yang sehat menciptakan landasan kokoh bagi pencapaian tujuan organisasi. Ada point utama lingkungan pengendalian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Standar Operasional Prosedur sebagai landasan pengendalian, 2) Otorisasi dan Pemisahan Tugas, dan 3) Keterlibatan manajemen dan staf.

SOP merupakan instruksi tertulis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses. Dalam konteks Dinas Kesehatan kabupaten Sikka, penggunaan SOP untuk pengendalian persediaan obat-obatan menunjukkan komitmen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang sehat. COSO (2013) menekankan pentingnya SOP dalam membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan proses. (COSO, 2013).

Adanya proses verifikasi oleh pimpinan sebelum pengeluaran obat dari gudang menunjukkan struktur otoritas yang jelas dan pemisahan tugas yang baik. COSO (2013) menyoroti pentingnya otorisasi sebagai salah satu elemen pengendalian internal yang memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan yang tepat. Selain itu, pemisahan tugas antara verifikasi dan pengeluaran obat membantu mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat terjadi ketika satu individu memiliki kontrol penuh atas seluruh proses (COSO, 2013).

Melibatkan staf dalam proses penyiapan obat setelah melalui tahap verifikasi dan persetujuan oleh pimpinan menunjukkan adanya partisipasi aktif dari manajemen dan staf dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat. COSO (2013) menekankan pentingnya komunikasi dan keterlibatan dari semua pihak dalam menjaga efektivitas pengendalian internal. Dengan melibatkan staf, manajemen dapat memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan (COSO, 2013).

Melalui pendekatan ini, Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menegaskan komitmennya terhadap pengendalian internal yang kuat dalam manajemen persediaan obat-obatan. Dengan menerapkan SOP, otorisasi yang jelas, dan melibatkan manajemen serta staf dalam proses, lingkungan pengendalian yang sehat dapat diciptakan untuk memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

## Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi berbagai ancaman dan peluang, menilai dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut, serta menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Penilaian risiko membantu organisasi untuk memahami potensi dampak negatif dan positif dari risiko-risiko yang dihadapi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Terdapat 3 (tiga) point utama penilaian risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) identifikasi risiko dan komitmen untuk pengelolaan risiko, 2) Respon terhadap risiko, dan 3) Integrasi penilaian risiko dengan SOP.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko kritis terkait dengan penyimpanan obat-obatan, terutama memperhatikan faktor-faktor penting seperti suhu dan infrastruktur penyimpanan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kondisi penyimpanan obat-obatan. COSO (2013) menekankan pentingnya organisasi untuk secara terus-menerus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang ada untuk memastikan bahwa upaya pengendalian internal mereka tetap efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. (COSO, 2013).

Dengan demikian, penilaian risiko di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penyimpanan obat-obatan, dengan integrasi yang kuat antara identifikasi risiko, respons terhadap risiko, dan pembaharuan SOP. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang ditekankan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

PP No. 60 Tahun 2008 menuntut agar lembaga pemerintah melakukan penilaian risiko secara teratur. Dalam konteks Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang krusial seperti suhu dalam penyimpanan obat-obatan. Praktik ini sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang mendorong lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi.

## Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Ini meliputi berbagai langkah, prosedur, kebijakan, dan praktik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatifnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa risiko-risiko dapat dikelola dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih aman dan efisien. Terdapat 3 (tiga) point utama aktivitas pengendalian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Pemisahan tugas yang jelas, 2) Regulasi melalui SOP, dan 3) Sistem pelaporan internal yang rutin.

PP No. 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa lembaga pemerintah harus melaksanakan aktivitas pengendalian yang efektif untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, aktivitas pengendalian dilakukan melalui pembagian tugas dengan jelas melalui SOP, sistem pelaporan internal yang rutin, dan pemastian adanya otorisasi dalam setiap proses pengeluaran obat dari gudang. Ini

sesuai dengan persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya tindakan konkret dalam mengelola risiko-risiko.

### **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal melibatkan aliran informasi yang efektif dan transparan di organisasi, serta proses komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan dan pengelolaan risiko. Ini mencakup pertukaran informasi yang tepat antara manajemen dan karyawan, serta pemakaian sistem informasi yang handal untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Dengan komunikasi dan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mencegah kecurangan, dan mengatasi masalah dengan cepat. Terdapat 3 (tiga) point utama informasi dan komunikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Laporan mutase sebagai serana komunikasi, 2) Pertemuan koordinasi, dan 3) Rapat evaluasi kebijakan dan prosedur.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan informasi terkait persediaan obat-obatan disampaikan secara jelas dan cepat melalui laporan mutasi yang dikirim setiap bulan kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk menjaga aliran informasi yang lancar dan transparan terkait dengan persediaan obat-obatan. Dengan mengirimkan laporan mutasi secara rutin, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat memberikan update yang terperinci tentang perubahan dalam persediaan obat-obatan kepada pihak yang membutuhkan, termasuk manajemen, staf gudang, dan pihak terkait lainnya. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengadakan pertemuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dengan pengelola obat di puskesmas untuk bertukar informasi dan menyampaikan pembaruan terkait kebijakan atau prosedur pengendalian. Pertemuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memastikan aliran informasi yang efektif dan transparan antara berbagai unit organisasi. Melalui pertemuan ini, para petugas dapat bertukar informasi, menyampaikan pembaruan terkini, dan membahas masalah yang relevan. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan puskesmas, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. (COSO, 2013).

### **Pemantauan**

Pemantauan dalam sistem pengendalian internal adalah proses untuk secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas operasional dari kontrol internal yang telah ditetapkan. Ini melibatkan peninjauan terhadap kegiatan sehari-hari untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur pengendalian tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Pemantauan juga melibatkan identifikasi dan penanganan masalah atau pelanggaran yang terdeteksi selama proses pemantauan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal terus berfungsi secara efektif dan dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Terdapat 3 (tiga) point utama pemantauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, yaitu 1) Pemantauan melalui stock opname bulanan, 2) Pemantauan menggunakan indikator kinerja, dan 3) Audit internal berdasarkan SOP.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan pemantauan efektif terhadap persediaan obat-obatan melalui stock opname bulanan. Prosedur ini melibatkan pengecekan kesesuaian antara kartu stok, fisik barang, dan pelaporan. Dengan

membandingkan data yang tercatat dalam kartu stok dengan jumlah fisik barang yang ada dan pelaporan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakcocokan yang mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Langkah ini memungkinkan untuk segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan. (COSO, 2013).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menggunakan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Setelah stok opname dilakukan, dilakukan kajian untuk mengevaluasi kinerja pengendalian internal. Praktik ini mencerminkan komitmen untuk secara sistematis mengevaluasi kinerja pengendalian internal dan mengukur keberhasilannya. Informasi yang diperoleh dari kajian tersebut dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan manajemen dan memperbaiki proses-proses yang ada. (COSO, 2013).

#### **4. Penutup**

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan lingkungan pengendalian yang sehat. Mereka memastikan adanya SOP yang terinci dan komitmen terhadap kontrol kualitas dan keamanan dalam manajemen persediaan obat-obatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara aktif mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan penyimpanan obat-obatan, seperti masalah suhu dan pemadaman listrik. Tindakan proaktif ini mencerminkan upaya mereka untuk memahami dan mengelola risiko-risiko potensial dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan aktivitas pengendalian yang efektif, seperti pembagian tugas yang jelas, pembuatan SOP terinci, dan proses verifikasi sebelum pengeluaran obat. Langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko konflik kepentingan dan kesalahan dalam pengelolaan persediaan obat-obatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memastikan aliran informasi yang lancar dan transparan terkait dengan persediaan obat-obatan melalui laporan mutasi bulanan dan pertemuan rutin dengan pengelola obat di puskesmas. Praktik ini mendukung komunikasi yang efektif dan memastikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dengan melakukan stok opname bulanan, menggunakan indikator kinerja, dan melakukan audit internal sesuai SOP, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara terus-menerus memantau efektivitas pengendalian internal. Praktik ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi perbedaan atau kelemahan yang memerlukan perbaikan segera.

#### **Saran**

##### **1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.**

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat-obatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka perlu memperkuat kesadaran risiko melalui pelatihan kepada staf, memperbaiki proses pemantauan dengan meningkatkan frekuensi audit internal dan penggunaan indikator kinerja yang lebih komprehensif, mengembangkan sistem informasi yang lebih canggih, meningkatkan komunikasi antara unit organisasi, melakukan pelatihan rutin bagi karyawan, dan secara berkala mengevaluasi serta memperbarui SOP sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dapat meningkatkan pengendalian internal dan kinerja dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

##### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi SOP dalam pengelolaan persediaan obat-obatan serta eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap SOP, dengan tambahan penelitian terkait penggunaan teknologi informasi dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

### Daftar Pustaka

- Achmad, A. A., Anwar, A., Azis, F., & Akuntansi, J. (n.d.). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA APOTEK. In *Bongaya Journal of Research in Accounting* (Vol. 6).
- Dika, T. R., Langgeng N, A., & Alfian, M. (n.d.). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PERSEDIAAN OBAT PADA APOTEK GAJAH MADA TEGAL.
- Gesah, R., Prabowo, M., Rahmawati, S., & Tulungagung, U. (n.d.). Journal of Accounting and Tax ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG JADI PADA GALLERY MAYA PROJECT.
- Kadek Oktaviani, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., Pariwisata, dan, Hindu Indonesia Jl Sangalagit, U., Denpasar Tim, K., & Denpasar, K. (n.d.). Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat Pada Apotek Star Medika Abianbase Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati (2) (1)(2).
- Saputra, D., & Abrar. (2022). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Persediaan Obat Pada Apotek Di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 23–33. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3189>
- Lawang SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Gelar Sarjana Ekonomi, W., & Purwati, H. (n.d.). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT (Studi Kasus pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman).
- Maruf, J. M., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2019). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI PUSKESMAS BAHU ANALYSIS OF INTERNAL DEVELOPMENT OF MEDICINE INVENTORY IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS IN PUSKESMAS BAHU. *Analisis... 3099 Jurnal EMBA*, 7(3), 3099–3108.
- Najiyah, yati, Eriswanto, E., Kartini, T., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (n.d.). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggengeng Kabupaten Sukabumi) (Vol. 9, Issue 2).
- Skripsi Oleh, A. (n.d.). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA KLINIK AZ-ZAHRO SUMENEP.
- Sudiarto, E., Kurniawan, D., Djuhari, D., Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçewara, S., & Timur Alamat Korespondensi, J. (n.d.). MAKNA PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT-OBATAN DI PUSKESMAS PUNCU.
- Aditya Pangadda, R., & Atmanto, D. (2015). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PERSEDIAAN OBAT-OBATAN DALAM UPAYA Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Rumah Sakit Islam Unisma Malang). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol (Vol. 27, Issue 2). Buku Sistem Akuntansi*. (n.d.).
- dan Siti Suryani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend Yani, F. A. (2017). ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL OF TRADE IN GOODS INVENTORIES TOKO UTAMA SECURITY CCTV PEKANBARU (Vol. 1, Issue 2).
- Irman, M., Rini, D., Sekolah, A., Ilmu, T., Pelita, E., Jalan, I., & Yani, J. A. (n.d.). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Persediaan Barang Dagang pada PT. Abetama Sempurna Pekanbaru (Mimelientesa Irman) ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM MERCHANDISE INVENTORY AT THE PT. ABETAMA SEMPURNA PEKANBARU.
- Penelitian, L., Penerbitan, D., Penelitian, H., & Ekonomipersada Bunda, S. (2019). SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADAPD. MUTIARA JAYA RESTI RIANDI. 1. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Republic Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.